

BENANG MERAH REVOLUSI

Pengantar Penulis

Pergolakan social di Brebes memiliki makna penting sebagai peristiwa local revolusi Indonesia, karena merupakan sebuah revolusi social yang memiliki cirri-ciri khusus sesuai dengan derajat lokalitas karakteristik masyarakat Brebes. Dalam konsepsi ini, revolusi social dimaknai sebagai suatu upaya perubahan untuk mengubah struktur masyarakat colonial-feodal menuju suatu tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. Tatanan masyarakat demokratis merupakan cita-cita perjuangan yang mulai dirintis oleh Sarekat Islam di Pekalongan pada tahun 1918, yang kemudian diteruskan oleh gerakan PKI dan Sarekat Rakyat sampai dengan tahun 1926, tetapi revolusi baru ketemu momentum pada bulan Oktober-November 1945. Pada bulan-bulan inilah pergolakan social bergolak dengan munculnya berbagai kekuatan dalam revolusi, terutama yang paling menonjol adalah kekuatan Islam, PKI, dan tentara.

Benang merah dari peristiwa local ini adalah kemerosotan kehidupan social-ekonomi rakyat pedesaan pada masa colonial, kemudian ditambah lagi dengan kemelaratan akibat “kekerasan” ekonomi masa pendudukan Jepang, telah memunculkan luapan amarah rakyat pasca Proklamasi Kemerdekaan 1945. Mereka melakukan aksi-aksi politik dan melakukan pendulatan terhadap elit birokrasi yang semasa penjajahan dianggap sebagai “perpanjangan tangan penjajah”. Hampir seluruh elit birokrat di Brebes, *pangreh praja* (bupati, wedana, dan camat), dan sebagian besar kepala desa “didaulat” dan diganti oleh aparat pemerintahan baru, yang terdiri dari kelompok-kelompok Islam, Sosialis, dan Komunis. Terhadap aksi ini, istilah perampokan, penyelewengan, dan pemberontakan sering digunakan di samping istilah pergerakan dan perjuangan. Untuk peristiwa di Brebes ini, adalah tidak berlebihan jika penulis menggunakan istilah revolusi sosial dalam menyebutnya.

Untuk mengurai benang merah mengapa revolusi sosial di Brebes tahun 1945 ini terjadi, maka sebaiknya perlu dilihat berdasarkan sudut pandang sejarah sosial politik daerah tersebut. Pada masa tanam paksa 1830-1870, di daerah ini sering terjadi aksi protes sosial terhadap tanam paksa gula dan beban wajib kerja (*corvee*) yang menjadi inti dari Sistem Tanam Paksa Belanda. Sebagai bentuk resistensi, rakyat Brebes sering melakukan penyerangan-penyerangan terhadap pabrik gula dan membunuh pegawai Belanda seperti yang terjadi pada tahun 1864 di bawah pimpinan “Brandal Mas Cilik” yang berasal dari Tegal. Pada tahun 1926, aksi protes sosial terjadi kembali melawan *corvee* di bawah pengaruh gerakan Komunis. Kelompok kiri inilah yang muncul kembali memimpin badan-badan perjuangan dan menyusun strategi politik untuk mengubah struktur pemerintahan di Tiga Daerah (Brebes-Tegal-Pemalang) pada tahun 1945.

Revolusi sosial di Brebes lebih daripada sekedar protes sosial terhadap kolonialisme Belanda. Selain latar belakang politik dan ekonomi, revolusi sosial tahun 1945 di Brebes pun harus disoroti kepemimpinannya atau ideologinya dan konteks sosial kebudayaannya, yakni dalam konsepsi apa makna revolusi bagi pelakunya sendiri. Dalam hal ini sumber sejarah lisan sangat membantu sekali dalam mengkaji secara lebih mendalam segi kebudayaan sebuah revolusi sosial. Contohnya bagaimana pemahaman rakyat pada waktu itu terhadap istilah “merdeka”. Tentunya pemahaman akan makna kemerdekaan akan berbeda pada setiap orang tergantung bagaimana ia menterjemahkannya.

Pendekatan kebudayaan menunjukkan pentingnya persepsi tentang kedaerahan yang ada. Brebes, yang memiliki perbatasan dengan wilayah Jawa Barat yang berbahasa Sunda dan daerah pedalaman Banyumas ke selatan, bukan saja secara geografis terpecah belah, melainkan pula adat istiadat dan bahasanya pun ditarik kedua arah. Ia diibaratkan sebuah kenong atau alat gamelan yang bebas tergantung. Kalau retak sukar di "tambal". Memang, Brebes terletak di antara Jawa Barat yang berbahasa dan berbudaya Sunda, dan Jawa Tengah yang berbahasa dan berbudaya Jawa. Masing-masing kebudayaan bertahan eksistensinya, dan bahkan sangat sulit menemukan adanya asimilasi dalam dua kebudayaan yang berbeda tersebut. Meskipun dalam budaya dan bahasa yang berbeda, tetapi loyalitas terhadap perasaan "Brebes" tetap berlangsung sampai sekarang.

Ditemukan beberapa sifat umum dari revolusi sosial di Brebes diantaranya adalah sifat-sifat anti golongan priyai atau pamong praja (elit birokrasi), anti unsur-unsur asing baik Belanda maupun Jepang, dendam yang mendalam, politik, dan banyaknya kelompok sosial yang didalmnya. Selain sifat-sifat umum, revolusi sosial di Brebes juga memiliki karakteristik dan kekhasan tersendiri, dimana beberapa sifat khusus tidak terdapat dalam revolusi sosial di Tegal maupun Pemalang. Adapun cirri-ciri khusus tersebut adalah adanya "gejala dombreng" yang menyertai aksi pendaulatan, pembagian kekayaan ideologi sama rata sama rasa, peranan ulama dan lenggaong, revolusi budaya, pembunuhan terhadap (orang-orang indo-eropa, Cina, Manado, dan Ambon) revolusi ekonomi, dan peranan wanita dalam revolusi. Dua cirri khusus yang disebut terakhir, hanya terdapat dalam revolusi sosial di Brebes, sedangkan di Tegal maupun di Pemalang tidak ditemukan.

Ketika hendak memasukkan perspektif sejarah lokal dalam buku sejarah revolusi kemerdekaan Indonesia, diperlukan pelaku sejarah lokal sebagai sumber. Bagaimana seyogianya kita menggarap sumber-sumber tersebut. Untuk menemukan sumber primer pelaku atau saksi sejarah lokal, memerlukan waktu yang cukup panjang karena memerlukan strategi historis untuk proses heuristik maupun reduksinya. Andaligar informan bersedia memberikan data, maka diperlukan terciptanya suasana erat atau kekeluargaan dengan responden. Apabila nuansanya sudah demikian, maka akan banyak responden pelaku maupun saksi sejarah lokal yang bersedia memberikan data tentang revolusi lokal, dan mereka pada umumnya merasa senang ketika diwawancarai untuk dimintai data. Di sini, keterampilan koresponden benar-benar diperlukan sehingga dapat mengendalikan jalannya proses korespondensi. Umumnya para responden senang berbicara secara panjang lebar seremonial terlebih ketika menceritakan pengalamannya, maka koresponden sebaiknya menyiapkan kendali wawancara. Paling kurang diperlukan beberapa pertemuan untuk mendapatkan data yang lengkap. Namun demikian dalam penulisan ini tidak secara khusus menggunakan sumber lisan seutuhnya, melainkan saling mengisi antara sumber lisan, tulisan, maupun benda. Tentunya legalitas sejarah sangat tergantung pada ketajaman metodologis yang digunakan sehingga proses heuristik, reduksi berupa kritik intern maupun ekstern, interpretasi berupa analisis dan sintesis, serta historiografi merupakan kesatuan metodologis yang penting dalam menulis karya sejarah ini.

Pada kesempatan yang paling akhir dari sebuah pengantar ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyelesaian buku ini. Semua responden yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan

penulis, sehingga diperoleh data yang begitu lengkap untuk kepentingan analisis ini. Tentunya kepada saudara Ade Maruf sebagai Direktur Continuum Press yang telah menerbitkan buku ini penulis mengucapkan terima kasih yang dalam. Semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang budiman. Amin.

Yogyakarta, 1 Januari 2008

Aman